

BAB II

KURIKULUM NASIONAL MATA PELAJARAN SEJARAH TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

A. Kurikulum Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional selama bertahun-tahun pemerintahan Orde Baru telah diabdikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelanggaran kekuasaan. Selama bertahun-tahun pula kurikulum pendidikan di Indonesia dikritik sebagai *reduktif* dan *sentralistik*. Pendidikan direduksi menjadi sangat pragmatis, yaitu antara siap pakai dan tidak siap pakai, sehingga menghilangkan substansi atau esensi dari pendidikan yang sebenarnya. Kurikulum pendidikan yang bersifat sentralistik dimana segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengembangan kurikulum dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga kurikulum yang dihasilkan bersifat nasional atau dengan kata lain berlaku di seluruh wilayah negara. Hal ini dipandang tidak sesuai dengan realitas negara Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki berbagai keragaman dalam kondisi, kebutuhan dan tingkat kemajuan di setiap daerah. Akibat sentralistik, sekolah tidak memiliki kebebasan mengembangkan diri, peserta didik mempunyai beban belajar yang berat dan guru hanya sekedar menjadi pelaksana petunjuk, sehingga tidak kreatif dalam mendampingi peserta didik.

Sejak Era Reformasi terjadi berbagai perubahan besar di dalam organisasi pendidikan nasional. Terutama dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pasal 13 ayat 1 dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan atau otonomi kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.¹ Dengan adanya UU tersebut diperlukan untuk mengubah pengelolaan pendidikan nasional yang dahulu bersifat sentalistik menjadi desentralistik.

Penyelenggaraan pendidikan yang diserahkan kepada otonomi daerah mempunyai makna bahwa otonomi pendidikan di dalam rangka ini, pendidikan diserahkan kepada semua komponen atau *stakeholders* yang berkepentingan, termasuk komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan itu sendiri sehingga secara langsung dapat bertanggung jawab atas keberadaan dan proses pendidikan yang dimilikinya. Selain itu pula, pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masyarakat yang tercermin pada penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tingkat satuan pendidikan.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Dengan adanya UU Sisdiknas maka kerangka dasar dan struktur kurikulum

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 13 ayat 1 bagian f, Hal. 15.

ditetapkan oleh pemerintah, namun wewenang pengembangan kurikulum ada di satuan pendidikan.

Setelah adanya otonomi daerah, kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi, diantaranya Kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

KBK diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Namun kurikulum ini tidak berlaku lama karena harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Tahun 2006 pemerintah meluncurkan Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2006 dapat dikatakan sebagai KBK yang disempurnakan karena mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP) yang merupakan penjabaran UU Sisdiknas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa KBK merupakan embrio dari KTSP.

Pada Kurikulum 2006 pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menunjuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) untuk menyusun Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Selanjutnya, setiap satuan pendidikan menyusun KTSP dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini menurut Widyastono sesuai dengan manajemen pengembangan kurikulum sentralistik-desentralistik, yaitu kurikulum yang komponennya sebagian dirumuskan oleh pusat dan sebagian lagi oleh satuan pendidikan.²

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik. Maka dari itu, kurikulum disusun oleh

² Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal. 48-88.

satuan pendidikan dengan melakukan penyesuaian terhadap program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Kurikulum 2006 meliputi beberapa dokumen, yaitu Dokumen 1 diantaranya berisi visi, misi, tujuan satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, beban belajar, dan kalender akademik. Dokumen 2 berupa silabus setiap mata pelajaran yang disusun oleh setiap guru. Dokumen 3 adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh setiap guru pula.

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah meluncurkan Kurikulum 2013 yang mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Terdapat berbagai pro dan kontra dalam peluncuran dan pelaksanaan kurikulum ini. Mulai dari berbagai opini tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai tergesah-gesah hingga permasalahan anggaran untuk Kurikulum 2013. Bahkan kurang dari satu bulan dari waktu yang direncanakan untuk implementasi, kurikulum ini belum mendapatkan “restu” dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dikutip dari harian *Kompas* (29/5) secara politis Kurikulum 2013 mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 27 Mei 2013, namun dengan catatan semua persyaratan diperhatikan dan harus dipenuhi, termasuk biaya/anggaran kurikulum.³ Meskipun demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Mohammad Nuh, sangat optimis dan menggebu-gebu dengan kurikulum ini. Mengenai sisa anggaran kurikulum mencapai kesepakatan dan ditandatangani dalam rapat kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

³ *Kompas*, “Kurikulum 2013 Lanjut *Secara Politis Sudah Tidak Ada Masalah”, 29 Mei 2013.

dengan Komisi X DPR pada tanggal 18 Juni 2013.⁴ Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada Juli 2013 dan diimplementasikan secara terbatas untuk 6.325 sekolah yang tersebar di 295 kabupaten/kota. Penerapan Kurikulum 2013 dimulai untuk kelas I dan IV SD, kelas VII SMP dan X SMA/MA/SMK.

Kurikulum 2013 dilatar belakangi oleh berbagai aspek. Pada lingkup internal, terdapat tantangan yang terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 205-2025) pemerintah memperkirakan bahwa:

“Dalam 20 tahun mendatang Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin makin besar sehingga pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.”⁵

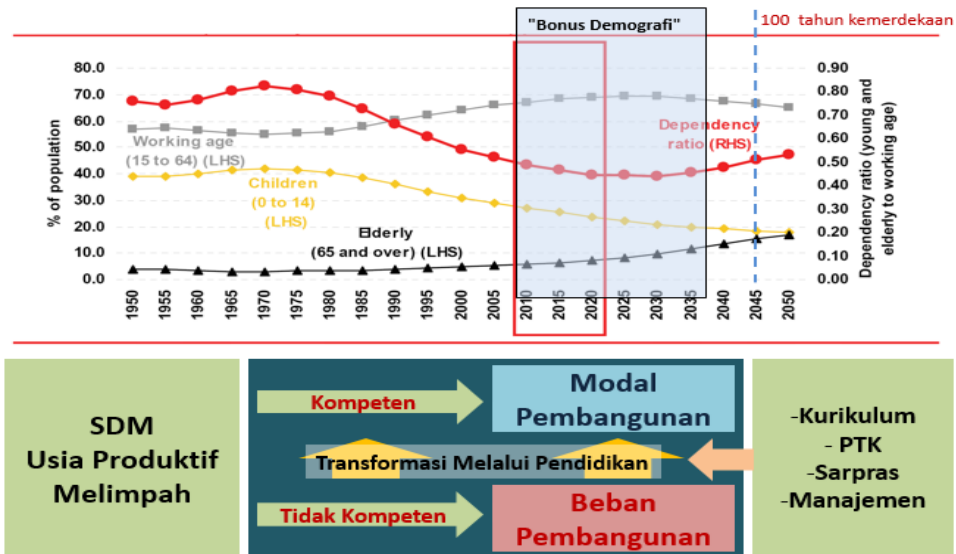
Lebih lanjut Pambudy dalam tulisannya di harian *Kompas* (25/11/11) menyatakan:

“Meneropong Indonesia 2025, salah satu keuntungan negeri ini adalah bonus demografi (*demographic dividend*) karena perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya rasio ketergantungan berdasarkan umur (*age dependency ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk anak-anak (di bawah usia 15 tahun) dan penduduk lansia (di atas 65 tahun) terhadap populasi usia kerja (15-64 tahun). Besarnya populasi usia kerja tersebut merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi. Pengurangan jumlah anak meningkatkan pendapatan per kapita,

⁴ *Kompas*, “Dana Pendidikan Sisa Anggaran Kurikulum 2013 Disepakati”, 20 Juni 2013.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Hal. 21.

sementara besarnya jumlah penduduk usia kerja mendorong peningkatan pendapatan per kapita.”⁶



Sumber: Paparan Mendikbud dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 (Kemdikbud, 2013)

Gambar 2.1 Demografi SDM yang produktif

Di Indonesia, pada tahun 1971 setiap 86 anak ditanggung 100 pekerja dan pada 2010 rata-rata 51 anak ditanggung 100 pekerja. Bila keadaan ini terus berlanjut, pada 2020-2030 akan terbuka jendela peluang (*window of opportunity*) saat angka ketergantungan mencapai titik terendah, yaitu hanya 44 anak ditanggung tiap 100 pekerja. Setelah 2030, jendela peluang akan menyempit karena meningkatnya jumlah lansia sehingga angka ketergantungan naik di atas 50.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sosialisasi Kurikulum 2013 memberikan paparan bahwa berdasarkan *window of opportunity* dan bonus demografi, kuantitas sumber daya manusia (SDM) berusia produktif akan melimpah. Oleh sebab itu, tantangan besar yang

⁶ Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy, “Jangan Sia-Siakan Bonus Demografi”, 25 November 2011.

dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang melimpah dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan, sehingga dapat menjadi modal untuk pembangunan Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk mentransformasikan SDM usia produktif melalui pendidikan adalah dengan menata ulang kurikulum pendidikan Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014 (Perpres No. 5 Tentang RPJMN 2010-2014) yang memaparkan bahwa penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah.⁷

Pada tatanan global, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, terutama dalam era globalisasi pasar bebas, baik di lingkungan negara-negara ASEAN seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *ASEAN Free Labour Area* (AFLA), maupun di kawasan-kawasan Asia Pasific (APEC). Era globalisasi berpotensi menimbulkan berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan, sehingga masyarakat dihadapkan pada berbagai perubahan yang sangat kompleks dan tidak menentu. Ibarat nelayan di “laut lepas” yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki “kompas” sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Itu berarti bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan

⁷ Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014, Hal. I-52.

di era globalisasi masyarakat perlu diberikan bekal sehingga tidak tergilas dalam era globalisasi bahkan mampu bersaing. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dari hari ke hari juga menjadi tantangan karena masyarakat semakin mudah dan bebas akses berbagai informasi dari berbagai media massa, terutama media elektronik.

Pada kehidupan era global menuntut berbagai perubahan pendidikan yang bersifat mendasar. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya perubahan dari pandangan hidup masyarakat lokal ke masyarakat global dan perubahan pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. Berbagai perubahan tersebut harus bisa diakomodasi oleh pendidikan karena pada akhirnya aspek kultural dari kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan pendidikan nilai dan sikap lebih penting dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan nasional tidak hanya dilakukan dengan melihat kebutuhan internal masyarakat dan bangsa, tetapi juga pandangan tersebut perlu dijalani dengan pandangan ke luar dan ke depan karena masyarakat Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang semakin menyatu.

Selain itu, adanya Kurikulum 2013 didorong oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah internasional. Hasil keikutsertaan Indonesia di dalam Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)⁸ dan Program for International

⁸ TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) adalah studi internasional untuk kelas IV dan VIII dalam bidang Matematika dan Sains. TIMSS dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa berbagai negara di dunia sekaligus memperoleh informasi yang bermanfaat tentang konteks pendidikan Matematika dan Sains. TIMSS dilaksanakan secara berkala, setiap empat tahun sekali TIMSS memberikan kesempatan pada negara-peserta untuk memperoleh informasi tentang prestasi siswa di bidang Matematika dan Sains.

Student Assessment (PISA)⁹ menunjukkan bahwa pencapaian anak-anak Indonesia belum cukup baik dalam beberapa kali laporan studi. Hasil TIMSS 2007 menunjukkan bahwa hanya 5% siswa Indonesia yang dapat mengerjakan soal-soal dalam kategori tinggi dan *advance* yang memerlukan *reasoning*, sedangkan 71% siswa Korea sanggup. Dalam perspektif lain, 78% siswa Indonesia mampu mengerjakan soal-soal dalam kategori rendah yang hanya memerlukan *knowing* atau hafalan. Data lain diungkapkan oleh PISA pada hasil studinya tahun 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah 10 besardari 65 negara peserta PISA. Hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level tiga saja, sementara banyak peserta didik dari negara lain dapat menguasai pelajaran sampai level empat, lima, bahkan enam. Dengan keyakinan semua anak dilahirkan sama, hasil dari kedua survei tersebut merujuk pada suatu simpulan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang serta apa yang dikerjakan peserta didik Indonesia pada saat itu berbeda dengan apa yang distandarkan di tingkat internasional. Menurut Widiastono hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia saat itu.¹⁰

⁹ PISA (*Programme for International Student Assessment*) adalah studi literasi yang bertujuan untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa usia akhir wajib belajar dalam membaca (*reading literacy*), matematika (*mathematics literacy*), dan sains (*scientific literacy*). Studi PISA yang dilaksanakan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation & Development*) dan *Unesco Institute for Statistics* itu mengukur kemampuan siswa pada akhir usia wajib belajar untuk mengetahui kesiapan siswa menghadapi tantangan masyarakat-pengetahuan (*knowledge society*) dewasa ini.

¹⁰ Herry Widyastono, *Op.cit.*, Hal. 122.

Berdasarkan beberapa aspek tantangan eksternal dan internal, pemerintah merasakan perlu untuk mengadakan Kurikulum 2013. Berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan dalam Era Globalisasi harus bisa diakomodasi oleh pendidikan agar pendidikan dapat menjadi bekal untuk masyarakat Indonesia dalam berkompetisi dan menghadapi Era Globalisasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman dan berbagai perubahan yang ada. Pada acara *talk show* “Rumah Perubahan Rhenald Kasali”, Nuh mengatakan bahwa jika kurikulum tidak berubah maka pada masa depan Indonesia akan menghasilkan anak-anak generasi usang dimana bekal pelajaran yang sudah didapat oleh anak-anak ini pada masa sekarang tidak bisa digunakan untuk memecahkan persoalan dimasa mendatang.

Secara umum tujuan ditetapkannya Kurikulum 2006 adalah memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya Kurikulum 2006 adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelolah dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Pada Kurikulum 2013, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Silabus, dan Pedoman Implementasi Kurikulum, sedangkan setiap kesatuan pendidikan seperti halnya pada Kurikulum 2006 juga menyusun KTSP, kecuali Dokumen 2 yang berupa Silabus setiap mata pelajaran. Silabus mata pelajaran sudah disusun pemerintah, guru tinggal mengopi dan menyusunnya menjadi satu kesatuan KTSP yang utuh.

B. Kurikulum 2006 Mata Pelajaran Sejarah Tingkat Sekolah Menengah

Atas

Struktur kurikulum SMA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun, yaitu mulai kelas X, XI dan XII. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu program umum di kelas X yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan program penjurusan pada kelas XI dan XII yang terdiri atas tiga

program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); (3) Program Bahasa.

Struktur kurikulum SMA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.

Pada Kurikulum 2006, salah satu dari mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik adalah mata pelajaran sejarah. Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas meliputi berbagai aspek, diantaranya (1) Prinsip dasar ilmu sejarah; (2) Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia; (3) Perkembangan negara-negara tradisional

di Indonesia; (4) Indonesia pada masa penjajahan; (5) Pergerakan kebangsaan; (6) Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia.

Pada kelas X semester 1 dan semester 2 alokasi waktu mata pelajaran sejarah adalah 1 jam pelajaran atau 45 menit. Ruang lingkup materi pada kelas X meliputi prinsip dasar ilmu sejarah dan peradaban awal masyarakat Indonesia dan dunia.

Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS dan Program Bahasa terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pada kelas XI dan XII Program IPA untuk semester 1 dan semester 2 alokasi waktu mata pelajaran sejarah adalah 1 jam pelajaran atau 45 menit. Ruang lingkup materi pada kelas XI Program IPA meliputi perjalanan bangsa Indonesia dari negara tradisional, kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga terbentuknya negara kebangsaan sampai lahirnya Orde Baru. Sedangkan pada kelas XII Program IPA meliputi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi sampai masa Reformasi serta mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20.

Pada kelas XI dan XII Program IPS untuk semester 1 dan semester 2 alokasi waktu mata pelajaran sejarah adalah 3 jam pelajaran atau 135 menit. Ruang lingkup materi pada kelas XI Program IPS meliputi perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-negara tradisional, perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang, dan sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah Bangsa Indonesia dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Sedangkan pada kelas XII Program

IPS meliputi perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga masa Reformasi serta perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir.

Pada kelas XI dan XII Program Bahasa untuk semester 1 dan semester 2 alokasi waktu mata pelajaran sejarah adalah 1 jam pelajaran atau 45 menit. Ruang lingkup materi pada kelas XI Program Bahasa meliputi perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-negara tradisional dan perjalanan bangsa Indonesia pada masa kolonial dan tumbuhnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Sedangkan pada kelas XII Program Bahasa meliputi perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru sampai dengan masa Reformasi.

Adanya perbedaan pembagian alokasi waktu mata pelajaran sejarah pada setiap tingkat dan jurusan, menurut Umasih tidak ada yang mengetahui apa yang melatarbelakanginya kecuali Eselon I atau menteri dan para pejabat yang setingkat dibawah menteri yang pada saat kurikulum dibuat dan dikembangkan.¹¹

Pada Kurikulum 2006 Mata pelajaran Sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan; melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan; menumbuhkan apresiasi dan

¹¹ Wawancara dengan Dr. Umasih, M.Hum, tim penyusun KTSP mata pelajaran IPS, pada 2 Desember 2015.

penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau; menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang; menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional.¹²

Kehadiran pendidikan sejarah dalam kurikulum menurut Hasan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu landasan politis, landasan filosofis dan landasan akademik.¹³ Landasan politis berkaitan dengan kehidupan bangsa dimana setiap bangsa harus mengetahui dan memiliki akar darimana dan bagaimana bangsanya terbentuk. Suatu bangsa dan kehidupan kebangsaannya saat ini merupakan pelanjut perjuangan karena itu mereka harus mengetahui apa yang telah dilakukan generasi sebelumnya. Dengan mengetahui apa yang telah dilakukan generasi sebelumnya dan kajian terhadap tantangan yang dihadapi kehidupan bangsa masa kini maka para pelanjut ini akan memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih baik dalam memperjuangkan kehidupan masa depan.

Landasan filosofis pendidikan sejarah didasarkan pada landasan filosofis kurikulum. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Brameld dalam

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006, Lampiran 3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMA, MA, SMALB, SMK, dan MAK. Hal. 524.

¹³ S. Hamid Hasan, *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran* (Bandung: Rizqi Press, 2012), Hal. 3-5.

Yulaelawati sebuah kurikulum dapat dikembangkan atas dasar empat filosofis, yaitu *perennialism*, *essentialism*, *humanisme*, dan *rekonstruksi*¹⁴. *Perennialism* menyebutkan bahwa pendidikan sejarah haruslah mampu mengembangkan rasa bangga terhadap prestasi bangsa di masa lampau. Pewarisan adalah sesuatu yang sangat penting dan warisan itu menjadi bahan untuk mengembangkan intelektualitas karena fungsi utama pendidikan adalah pengembangan intelektualitas. *Esensialisme* memandang pendidikan sejarah sebagai alat pengembangan kemampuan intelektual generasi muda. Sejarah haruslah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu dan tidak digabungkan dengan disiplin ilmu lainnya. *Humanisme* memandang pendidikan sejarah haruslah dipelajari untuk mengembangkan kepribadian peserta didik dan bukan hanya intelektual peserta didik semata. Artinya pendidikan sejarah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang dalam berpikir, bertindak, dan mengembangkan nilai-nilai yang menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan masyarakat. *Rekonstruksi* merupakan perkembangan lebih lanjut dari filosofi progresivisme dan memandang pendidikan sejarah untuk berorientasi ke masa sekarang dan masa depan. Pendidikan sejarah haruslah menyiapkan peserta didik untuk suatu kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan masa mendatang. Artinya, pendidikan sejarah tidak hanya terpaku pada masa lampau tetapi juga harus memberikan perhatian yang sama pada apa yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang.

¹⁴ Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Pakar Raya, 2004), Hal. 4-5.

Landasan akademik dalam pendidikan sejarah adalah pengalaman kontinu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh media pendidikan lainnya. Cerita sejarah sangat informatif tentang usaha manusia menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi dan merupakan media yang sangat baik untuk mengembangkan kreativitas, inspirasi, inisiatif dan kemampuan berfikir antisipatif. Sejarah berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia di masa lampau yang terus berlanjut ke masa kini dan masa mendatang. Apa yang telah dilakukan manusia dimasa lalu dan tersaji dalam cerita sejarah merupakan bagian dari kehidupan generasi muda masa kini dan generasi masa mendatang.

Berdasarkan SK dan KD mata pelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2006 terdapat landasan politis untuk mengetahui bagaimana terbentuknya bangsa Indonesia. Berbagai materi tentang sejarah Indonesia mulai dari zaman pra-aksara hingga era reformasi disajikan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik darimana dan bagaimana bangsanya terbentuk. Landasan filosofis pada mata pelajaran Sejarah adalah perennialisme dan esensialisme yang mengembangkan rasa bangga terhadap prestasi bangsa Indonesia di masa lampau untuk mengembangkan intelektualitas peserta didik. Pada SK dan KD dapat dilihat bahwa materi mata pelajaran sejarah dikembangkan untuk merekonstruksi aspek kognitif peserta didik.

C. Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah Tingkat Sekolah Menengah

Atas

Kurikulum 2013 dirancang secara utuh untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, tidak hanya meliputi aspek kognitif dan keterampilan tetapi juga sikap spiritual dan sikap sosial. Hal ini tercermin pada struktur isi Kurikulum 2013 yang menyangkut Kompetensi Inti (KI) 1 (kompetensi inti sikap spiritual), 2 (kompetensi inti sikap sosial), 3 (kompetensi inti pengetahuan), dan 4 (kompetensi inti keterampilan) beserta KD-KD-nya. Dalam pembelajaran guru diharapkan dapat mengaitkan KD-KD pada KI 3 dan KI 4 dengan KD-KD pada KI 1 dan KI 2, sehingga aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA pada setiap tingkat kelas.

Pada kurikulum 2013 mata pelajaran terdiri atas dua kelompok mata pelajaran, yaitu Kelompok Mata Pelejaran Wajib dan Kelompok Mata Pelejaran Peminatan. Hal ini menurut Widyastono untuk mewadahi konsep kesamaan antara muatan antara Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).¹⁵ Mata pelajaran pilihan untuk SMA terdiri atas pilihan akademik. Mata pelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai minat peserta

¹⁵ Herry Widyastono, *Op..Cit.*, Hal. 153.

didik. Struktur ini menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh S. Hamid Hasan, tim inti pengembangan Kurikulum 2013 yang juga Ketua Umum Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, dalam harian *Kompas* (25/01/2013) “tidak ada lagi penjurusan, tetapi peminatan. Siswa memiliki kebebasan mengembangkan minatnya”.¹⁶

Struktur kurikulum SMA terdiri atas (1) Kelompok mata pelajaran wajib, yaitu kelompok A dan kelompok B; (2) Kelompok mata pelajaran C, yaitu pilihan kelompok peminatan terdiri atas Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya. Mata pelajaran Kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Kelompok mata pelajaran wajib merupakan bagian dari pendidikan umum, yaitu pendidikan bagi semua warga negara yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa.

¹⁶ *Kompas*, “Pedoman Pendidikan: Kurikulum 2013 Tetap Diberlakukan”, 25 Januari 2013.

Selain kelompok mata pelajaran wajib, Kurikulum 2013 untuk SMA memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat peserta didik. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran antar kelompok peminatan. Kelompok mata pelajaran peminatan dan kelompok mata pelajaran lintas kelompok peminatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu sesuai dengan minat keilmuannya diperguruan tinggi.

Kelompok peminatan yang dipilih peserta didik terdiri atas kelompok Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya. Semua mata pelajaran yang terdapat pada satu kelompok peminatan wajib diikuti oleh peserta didik. Untuk mengikuti seluruh mata pelajaran di kelompok peminatan, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat atau pendalaman minat sebanyak 6 jam pelajaran di kelas X dan 4 jam pelajaran di kelas XI dan XII. Mata pelajaran lintas minat sebaiknya tetap dari kelas X sampai dengan XII.

Secara umum mata pelajaran sejarah dalam Kurikulum 2013 dirancang sebagai mata pelajaran yang sarat dengan keterampilan dan cara berpikir Sejarah, pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pengembangan inspirasi, dan mengkaitkan peristiwa sejarah nasional dengan peristiwa sejarah lokal dalam satu rangkaian Sejarah Indonesia. Inovasi ini diharapkan

akan membawa mata pelajaran Sejarah menjadi wahana pendidikan yang ampuh dalam membangun manusia Indonesia yang akan menghadapi tantangan global, membangun kehidupan kebangsaan yang produktif, dan mampu menjadi warga dunia dengan tetap memiliki kepribadian sebagai orang Indonesia.

Sejarah memiliki makna dan posisi yang strategis, mengingat:

1. Manusia hidup masa kini sebagai kelanjutan dari masa lampau sehingga pelajaran sejarah memberikan dasar pengetahuan untuk memahami kehidupan masa kini, dan membangun kehidupan masa depan.
2. Sejarah mengandung peristiwa kehidupan manusia di masa lampau untuk dijadikan guru kehidupan: *Historia Magistra Vitae*.
3. Pelajaran Sejarah adalah untuk membangun memori kolektif sebagai bangsa untuk mengenal bangsanya dan membangun rasa persatuan dan kesatuan.
4. Sejarah Indonesia memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.¹⁷

Pada Kurikulum 2013, Mata pelajaran sejarah terbagi kedalam dua kelompok, yaitu (1) Sejarah Indonesia untuk kelompok mata pelajaran wajib; (2) Sejarah untuk kelompok mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran Sejarah Indonesia merupakan mata pelajaran yang memuat materi mengenai berbagai peristiwa yang berkaitan erat dengan asal-usul dan perkembangan

¹⁷ Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59, Hal. 421.

serta peranan masyarakat dan bangsa Indonesia pada masa lampau untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mata pelajaran Sejarah Indonesia memuat nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia untuk ditransformasikan kepada generasi muda sehingga melahirkan generasi bangsa yang unggul dengan penuh kearifan. Sedangkan mata pelajaran Sejarah merupakan kajian mengenai ilmu sejarah pada jenjang pendidikan SMA tentang berbagai peristiwa sejarah dalam masyarakat dan bangsa Indonesia pada masa lampau serta masyarakat dan bangsa lain di luar Indonesia sejak zaman paling tua sampai zaman terkini.

Sejarah Indonesia menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh seluruh peserta didik mulai dari kelas X, XI, dan XII dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran tatap muka di setiap kelas. 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Berarti tatap muka mata pelajaran Sejarah Indonesia di setiap kelas 2×45 menit = 90 menit. Sejarah Indonesia termasuk dalam kelompok mata pelajaran wajib yang merupakan bagian dari pendidikan umum, yaitu pendidikan bagi semua warga negara yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa.

Mata pelajaran Sejarah Indonesia dikembangkan atas dasar semua wilayah di Indonesia memiliki kontribusi terhadap perjalanan Sejarah Indonesia hampir pada seluruh periode sejarah. Setiap periode Sejarah Indonesia memiliki peristiwa dan atau tokoh di tingkat nasional dan daerah

serta keduanya memiliki kedudukan yang sama penting dalam perjalanan Sejarah Indonesia. Mata pelajaran Sejarah Indonesia memberikan pemahaman tentang masa lampau sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk membangun semangat kebangsaan dan persatuan. Mata Pelajaran Sejarah Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memperkenalkan peristiwa sejarah yang penting dan terjadi di seluruh wilayah NKRI serta seluruh periode sejarah kepada generasi muda bangsa. Pengembangan cara berpikir sejarah (*historical thinking*), konsep waktu, ruang, perubahan, dan keberlanjutan menjadi keterampilan dasar dalam mempelajari Sejarah Indonesia.

Mata pelajaran Sejarah Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:¹⁸

1. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa.
2. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.
3. Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 422.

4. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep waktu dan tempat/ruang dalam rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.
5. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau.
6. Mengembangkan kemampuan berpikir historis (*historical thinking*) yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, dan inovatif.
7. Menanamkan sikap berorientasi kepada masa kini dan masa depan.

Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Indonesia membahas materi yang meliputi zaman: (1) Praaksara; (2) Hindu-Buddha; (3) Kerajaan-kerajaan Islam; (4) Penjajahan bangsa Barat; (5) Pergerakan Nasional; (6) Proklamasi dan Perjuangan mempertahankan kemerdekaan; (7) Demokrasi Liberal; (8) Demokrasi Terpimpin; (9) Orde Baru; dan (10) Reformasi.

Kompetensi tertinggi yang dikembangkan di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, yaitu pada kelas X (1) Menganalisis keterkaitan antara dua peristiwa sejarah atau lebih; (2) Menganalisis makna/nilai suatu peristiwa sejarah yang ada dalam kehidupan masa kini dan bagi dirinya, pada kelas XI (1) Menganalisis untuk menentukan pokok pikiran / nilai utama sejarah yang ada pada suatu cerita sejarah dalam kehidupan bangsa masa kini; (2) Mengevaluasi berdasarkan kriteria internal kebenaran fakta dan hubungan sebab akibat suatu peristiwa sejarah, dan pada kelas XII (1) Mengevaluasi

berdasarkan kriteria standar (eksternal yang berlaku secara umum) kebenaran fakta beberapa cerita sejarah dan nilai dari beberapa peristiwa tersebut yang perlu diterapkan dalam dirinya; (2) Mencipta (originalitas) membuat tulisan tentang peristiwa sejarah dan artinya bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan dirinya.

Kompetensi Inti (KI) adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.¹⁹ Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.²⁰ Untuk menggambarkan hubungan antara KI dan KD, Nuh dalam tulisannya pada harian *Kompas* menjelaskan bahwa:

“Sejalan dengan UU, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus ditapak peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi inti meningkat seiring meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui kompetensi inti, sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan, integrasi vertikal antarkompetensi dasar dapat dijamin, dan peningkatan kemampuan peserta dari kelas ke kelas dapat direncanakan. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan. Dalam mendukung kompetensi inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar-kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi empat. Ini sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu dalam kelompok kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.”²¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Hal. 4.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Kompas*, “Kurikulum 2013”, 8 Maret 2012.

Menengah Atas/Madrasah Aliyah kompetensi dasar dalam kompetensi pengetahuan mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas X meliputi materi memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah; masa Pra-aksara di Indonesia; proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia dan karakteristik kehidupan masyarakatnya. Pada kelas XI mata pelajaran Sejarah Indonesia meliputi materi peristiwa sejarah pada masa penjajahan asing hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pada kelas XII meliputi materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan; perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan awal Reformasi; dan kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia.

Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran Sejarah termasuk dalam kelompok mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran Sejarah menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh seluruh peserta didik program Ilmu-Ilmu Sosial kelas X, XI, dan XII. Alokasi waktu mata pelajaran Sejarah adalah 3 jam pelajaran pada kelas X dan 4 jam pelajaran pada kelas XI dan XII. Program Matematika dan Ilmu Alam serta Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya bisa mengambil Mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran lintas minat dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran pada kelas X dan 4 jam pelajaran kelas XI dan XII.

Mata pelajaran Sejarah bertujuan:²²

1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui pengalaman sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain.
2. Mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan penghargaan kritis terhadap hasil dan prestasi bangsa Indonesia dan umat manusia di masa lalu.
3. Membangun kesadaran tentang konsep waktu dan ruang dalam berfikir kesejarahan.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir sejarah (*historical thinking*), keterampilan sejarah (*historical skills*), dan wawasan terhadap isu sejarah (*historical issues*), serta menerapkan kemampuan, keterampilan dan wawasan tersebut dalam kehidupan masa kini.
5. Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat dan bangsa.
6. Menanamkan sikap berorientasi kepada kehidupan masa kini dan masa depan berdasarkan pengalaman masa lampau.
7. Memahami dan mampu menangani isu-isu kontroversial untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
8. Mengembangkan pemahaman internasional dalam menelaah fenomena aktual dan global.

²² Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59, Hal. 1105-1106

Berdasarkan tujuannya mata pelajaran sejarah tidak hanya mempelajari Sejarah Indonesia, tetapi lebih luas mencakup ilmu sejarah, pengalaman sejarah bangsa lain dan fenomena aktual sehingga lingkup materinya lebih mengglobal. Adapun materi tentang sejarah Indonesia dikupas lebih mendalam dengan melihat relevansi berbagai peristiwa sejarah dunia dan sejarah bangsa lain yang mempengaruhi sejarah Indonesia.

Materi mata pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Atas meliputi Prinsip Dasar Ilmu Sejarah, Sejarah Indonesia sejak masa Pra aksara sampai dengan Masa Reformasi, dan Sejarah Dunia sejak masa Peradaban Kuno sampai dengan Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lebih rinci, mata pelajaran Sejarah meliputi: (1) Prinsip dasar Ilmu Sejarah; (2) Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia; (3) Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia; (4) Indonesia pada masa penjajahan; (5) Revolusi besar dunia dan pengaruhnya; (6) Kebangkitan heroisme dan kebangsaan Indonesia; (7) Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia; (8) Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia; (9) Dunia pada masa Perang Dingin dan perubahan politik global; (10) Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin; (11) Indonesia pada masa Orde Baru; (12) Indonesia pada masa Reformasi; (13) Indonesia dan Dunia pada masa Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan ruang lingkup materinya, konten pada mata pelajaran Sejarah lebih kompleks dengan materi yang lebih luas dan mendalam yang

mencakup Indonesia dan dunia. Hal ini berpengaruh terhadap alokasi waktu pelajaran yang mendapatkan porsi lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan tulisan Boediono²³ dalam harian *Kompas* (27/8/12)²⁴ yang memberikan perhatian lebih pada pengalaman sejarah sebagai salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa dapat menjadi jawaban atas banyaknya porsi jam pelajaran sejarah pada Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 memiliki landasan politis yang besar dan kuat untuk memberikan pemahaman nasionalis kepada peserta didik. Dengan adanya mata pelajaran Sejarah Indonesia yang khusus mempelajari dan memberikan pengetahuan tentang akar dan bagaimana bangsa Indonesia terbentuk. Selain itu juga, dalam mata pelajaran Sejarah materi tentang sejarah Indonesia dibahas lebih mendalam dengan mengaitkan berbagai faktor eksternal yang turut memberikan pengaruh pada sejarah Indonesia.

Secara koseptual, mata pelajaran Sejarah Indonesia mengkaji mengenai keunggulan dan kebesaran bangsa Indonesia di masa lampau dalam rangka membentuk rasa bangga terhadap prestasi bangsa di masa lampau dan pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan landasan filosofi pendidikan sejarah yaitu parrenialisme dimana pendidikan sejarah harus mengembangkan rasa bangga terhadap pretasi bangsa di masa lampau.²⁵ Sedangkan pada mata

²³ Pada saat Kurikulum 2013 dirancang dan dikembangkan, Boediono adalah wakil presiden Republik Indonesia yang secara tidak langsung memilik wewenang dalam perancangan Kurikulum 2013.

²⁴ *Kompas*, "Pendidikan Kunci Pembangunan", 27 Agustus 2012.

²⁵ S. Hamid Hasan, *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran* (Bandung: Rizqi Press, 2012), Hal. 4.

pelajaran Sejarah mengkaji mengenai berbagai peristiwa sejarah dalam pendekatan keilmuan, yaitu ilmu sejarah. Dalam hal ini landasan filosofi yang digunakan adalah essensialisme yang memandang pendidikan sejarah adalah alat pengembangan kemampuan intelektual generasi muda.²⁶ Pada KI dan KD dapat dilihat bahwa materi mata pelajaran sejarah dikembangkan untuk merekonstruksi aspek kongnitif peserta didik.

²⁶ *Ibid.*